



PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS

*Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024
Guna Mendukung SDG'S Indonesia 2045*

**Edisi 1
Desember 2019**

**Penerbit
STIE BANK BPD JATENG**

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS

STIE BPD ACCOUNTING FORUM (SAF)

2019

“Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024

Guna Mendukung SDG’s Indonesia 2045”



Penerbit

STIE Bank BPD Jateng

Jalan Arteri Soekarno - Hatta No. 88, Tlogosari Kulon, Pedurungan,

Kota Semarang (50196)

stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS
STIE BPD ACCOUNTING FORUM (SAF)
2019

“Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 Guna Mendukung SDG’s Indonesia 2045”

ISBN

9786027436725

Editor

Fika Azmi, SE, M.Si

Tebal Buku

574 Halaman

Edisi

Satu, Desember 2019

Publikasi Online

stiebankbpdjateng.ac.id/saf

Penerbit

STIE Bank BPD Jateng
Jalan Arteri Soekarno - Hatta No. 88, Tlogosari Kulon, Pedurungan,
Kota Semarang (50196)
stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit

© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

PANITIA PELAKSANA

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS
STIE BPD ACCOUNTING FORUM (SAF) 2019

“Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 Guna Mendukung SDG’s Indonesia 2045”

| | | |
|------------------------|---|--|
| Penasehat | : | Dr. E. Siti Puryandani, SE, M.Si. |
| Steering Committee | : | 1. Dr. Taofik Hidajat, SE, M.Si, CRBC. 2. Mekani Vestari, SE, M.Si, Ak.,CA. 3. Himawan Arif Sutanto, SE, M.Si. |
| Ketua | : | Nugroho Heri Pramono, SE, M.Si. |
| Sekretaris | : | Suci Atiningsih, S.Pd, M.Si. |
| Bendahara | : | Khairina Nur Izzaty, SE, M.Si, Ak. |
| Sie Acara & Protokoler | : | Taufik Andre Setiyono, SE, M.Ak. |
| Sie Artikel | : | Fika Azmi, SE, M.Si. |
| Sie Humas | : | Pratomo Cahyo Kurniawan, SE, M.Ak. |

Reviewer

Dr. Taofik Hidajat, SE, M.Si, CRBC.
Dr. Grace Tianna Solovida, SE, M.Si, Ak, CA
Ali Mursid, P.hD

Editor

Fika Azmi, SE, M.Si

Penerbit

STIE Bank BPD Jateng
Jalan Arteri Soekarno Hatta No 88, Tlogosari Kulon, Pedurungan,
Kota Semarang (50196)
stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| PANITIA PELAKSANA | iv |
| DAFTAR ISI | v |

A. SUB TEMA: AKUNTANSI KEUANGAN I

1. PENGARUH *CURRENT RATIO* (CR), *RETURN ON EQUITY* (ROE), *DEBT TO EQUITY* (DER), & *NET PROFIT MARGIN* (NRM) TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN
(Ika Agustina N. & Suyatmin Waskito A.) 1 - 25
2. KENAIKAN HARGA ROKOK TERHADAP KONSUMSI ROKOK DI KOTA SEMARANG
(Penta Widyartati, Ariyani Indriastuti, & Ira Setiawati) 26 - 35
3. ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, *FIRM SIZE*, *MEDIA EXPOSURE*, *LEVERAGE*, & UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP *CSR DISCLOSURE*
(Nursiam & Shinta Dwi Rahayu) 36 - 45
4. PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, *LEVERAGE*, & PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(Alfiyatul Maziyah & lin Indarti)..... 46 - 59
5. PENGARUH *RETURN ON ASSET*, *DEBT TO EQUITY RATIO*, *CURRENT RATIO*, ARUS KAS OPERASI, & PERTUMBUHAN PENJULAN TERHADAP RETURN SAHAM
(Nursiam & Silmi Agustin) 60 - 70
6. PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, *AUDIT FEE* & KUALITAS AUDIT TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2018)
(Titik Purwanti, Nawang Kalbuana, & Fiqi Rahmawati) 71 - 85
7. *FINANCIAL RISK DISCLOSURE* & TATA KELOLA PERUSAHAAN KEUANGAN PERIODE 2016-2018
(Shinta Permata Sari & Himmatus Sholikhah) 86 - 99

B. SUB TEMA: AKUNTANSI KEUANGAN II

1. PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, MODAL BANK, JUMLAH KANTOR CABANG, TINGKAT SUKU BUNGA & JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP JUMLAH KREDIT UMKM BANK BUMN
(Ade Onny Siagian)..... 100 - 127
2. PENERIMAAN PAJAK YANG DIMODERASI KUALITAS PELAYANAN FISKUS (STUDI PADA WPOP YANG MEMPUNYAI USAHA & BADAN KPP PRATAMA CANDISARI KOTA SEMARANG
(Mohklas) 128 - 137
3. PENGARUH LIKUIDITAS, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, & *LEVERAGE* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(Athaya Salsabila & Rina Trisnawati)..... 138 - 158

4. PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, RASIO RETENSI SENDIRI, RASIO BEBAN IKLAN, & *RISK BASED CAPITAL* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI
(Dwi Wahyu Pujiharjo)..... 159 - 176
5. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA SEMARANG TAHUN 2015-2017
(Wima Nurhidayanto) 177 - 189

C. SUB TEMA: AKUNTANSI & CORPORATE GOVERNANCE

1. *CORPORATE GOVERNANCE & CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*: TINJAUAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(Shinta Permata Sari & Agustina Maya Sari) 190 - 202
2. PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, UMUR LISTING & *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE* (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR *FOOD & BEVERAGE* YANG TERDAFTAR PADA PERUSAHAAN DI BEI PERIODE 2014-2017)
(Mela Susmawati) 203 - 218
3. PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, & UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI LQ45 TAHUN 2014-2018)
(Benny Kurnianto, Nawang Kalbuana, & Umi Rianesa Rusiati) 219 - 232
4. PENGARUH RUANG FISKAL, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, & DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL
(Putriana Indah Budi Astuti & Andi Dwi Bayu Bawono)..... 233 - 269
5. PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP PROFITABILITAS
(Nindya Ardita Nur Amni, Dwi Intan Susiloningrum, & Iin Indarti)..... 270 - 285
6. ANALISIS PENGARUH *FEE BASED INCOME*, PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA, UKURAN PERUSAHAAN, & KONDISI EKONOMI TERHADAP PROFITABILITAS BANK
(Jihan Okti Amaliah & Widhy Setyowati) 286 - 303
7. PENGARUH SIKAP, NORMA SUBJEKTIF, & KONTROL PERILAKU TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK HOTEL, RESTORAN, & HIBURAN DI KOTA TEGAL)
(Asrofi Langgeng N. & Ibnun Aslamadin) 304 - 318
8. ANALISIS KEUANGAN & NON KEUANGAN CALON DEBITUR TERHADAP EFEKTIFITAS PEMBERIAN KREDIT PADA PD BPR BKK PURBALINGGA
(Anggita Ratnaningtyas & Widhy Setyowati)..... 319 - 332
9. PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL & PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN INVESTASI SWASTA SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Febri Rachmawati & Rina Trisnawati)..... 333 - 349

10. PENGARUH *TAX AVOIDANCE*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL & TRANSPARANSI INFORMASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Fitria Ulfa & Suci Atiningsih) 350 - 358

D. SUB TEMA: AKUNTANSI SYARIAH

1. PENGARUH *SHARIA CONFORMITY & ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KESEHATAN FINANSIAL PERBANKAN SYARIAH (Rusmiyatun & Nur Edi Cahyono) 359 - 376
2. IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK BNI CABANG SYARIAH SEMARANG (Siti Hasanah, Suryani Sri Lestari, Siti Mutmainah, & Iwan Budiyono) 377 - 387
3. PERKEMBANGAN, TANTANGAN, & PERAN *SHARIA ONLINE TRADING SYSTEM (SOTS)* DI PASAR MODAL SYARIAH DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (Muhammad Andryzal Fajar) 388 - 400
4. KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA *JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)* PERIODE TAHUN 2016-2018 (Suryakusuma Kholid H & Siti Puryandani) 401 - 409
5. MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL SEJAHTERA MANDIRI (Erika Zunita Cahyani & Fika Azmi) 410 - 421

E. SUB TEMA: AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

1. PENGARUH RUANG FISKAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PERSENTASE KEMISKINAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA FUNGSI EKONOMI DI INDONESIA (STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TAHUN 2018) (Ayustika Isminanda & Andy Dwi Bayu Bawono) 422 - 443
2. PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, *FREE CASH FLOW*, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, & UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN (Fachriyatul Millah & Mekani Vestari) 444 - 459
3. PENGARUH RUANG FISKAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN PERSENTASE KEMISKINAN TERHADAP BELANJA FUNGSI KESEHATAN DI INDONESIA (Ina Sari Darmastuti & Andy Dwi Bayu Bawono) 460 - 477
4. PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK & KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Wa Ode Aprisilia Zahratur Aziz & Muhammad Yusuf) 478 - 493
5. PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, & *JOB RELEVANT INFORMATION* TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN (Yustinus Hutama Marianus & Suci Atiningsih) 494 - 506

F. SUB TEMA: TOPIK LAIN YANG RELEVAN

1. PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENGALAMAN KEUANGAN, & SIKAP MONETER KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN KEPEMILIKAN ASURANSI JIWA PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG PANCORAN MAS DEPOK
(Syahvira Septiarizk & Nurhidayati Dwiningsih) 507 - 522
2. ANALISIS PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI PROFESIONAL TERHADAP KINERJA SDM (STUDI EMPIRIK PADA PT. ADJITAMA PERSADA JAKARTA)
(Biatmoko Agung Nugroho, Endah Winarti HS, & Harnoto) 523 - 536
3. APAKAH *CELEBRITY ENDORSEMENT* PRODUK HALAL DAN CITRA MEREK BERPENGARUH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN *SKIN CARE* SAFI?
(Desi Tya Astuti & Francy Iriani) 537 - 549
4. PENGARUH KUALITAS KEHIDUPAN KERJA, KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL & KETERLIBATAN KERJA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASIONAL
(Kertati Sumekar, Sri Mulyani, & Zulfa Deviga Octaviana) 550 - 564
5. PRODUK HALAL DAN MINAT BELI KONSUMEN
(Budi Suryowati & Irpiani)..... 565 - 574

Analisis Keuangan dan Non Keuangan Calon Debitur Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada PD BPR BKK Purbalingga

Anggita Ratnaningtyas¹, Widhy Setyowati²

¹Afiliasi Penulis Pertama, (STIE Bank BPD Jateng)

Email: anggitaratnaningtyas03@gmail.com

²Afiliasi Penulis Kedua, (STIE Bank BPD Jateng)

Email: widhisetyowati61@gmail.com

Abstract

Research with the title “The Role of Financial Report Analysis, 5C Prospective Debtor Principal Assessment, and Credit Supervision of the Effectiveness of Lending to PD. BPR BKK Purbalingga” has the objective, namely (i) to know the role of financial position and procedures for evaluating the financial statements of prospective borrowers in approving credit applications, (ii) to find out how banks evaluate the 5C principles of prospective borrowers, and (iii) to knowing the implementation and supervision of credit. In this study, the author uses descriptive method, namely by collecting and analyzing data, so as to provide a clear picture in accordance with the title of this study. Data collection techniques used were interviews and documentation. The results of this study explain (i) the importance of analyzing the prospective debtor’s financial statements and the analytical procedures carried out by the bank, (ii) the 5C principle assessment carried out by the bank, (iii) the process and importance of credit supervision carried out by the bank.

Keywords : financial statement analysis, 5C principle, credit supervision, effectiveness of lending

Abstrak

Penelitian dengan judul “Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur, dan Pengawasan Kredit terhadap Efektivitas Pemberian Kredit pada PD. BPR BKK Purbalingga” ini memiliki tujuan yaitu (a) untuk mengetahui peranan posisi keuangan dan prosedur penilaian laporan keuangan calon debitur bagi perbankan dalam menyetujui permohonan kredit, (b) untuk mengetahui bagaimana bank melakukan penilaian terhadap prinsip 5C calon debitur, dan (c) untuk mengetahui pelaksanaan dan pengawasan kredit. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan judul penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang (a) pentingnya analisis laporan keuangan calon debitur dan prosedur analisis yang dilakukan oleh bank, (b) penilaian prinsip 5C yang dilakukan oleh bank, (c) proses dan pentingnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank.

Kata kunci : analisis laporan keuangan, prinsip 5C, pengawasan kredit, efektivitas pemberian kredit

1. Pendahuluan

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat. Hal ini dikarenakan fungsi bank sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak – pihak yang kelebihan dana (*surplus of found*) dengan pihak – pihak yang membutuhkan dana (*luck of found*). Menurut (Hermansyah, 2017) dalam bukunya Hukum Perbankan Nasional Indonesia mengatakan sebagai *agent of development*, Bank merupakan alat pembangunan nasional melalui segala jenis usaha pembangunan yaitu salah satunya sebagai *financial intemediary* (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.

Menurut Pasal 3 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebutkan sebagai Undang – Undang Perbankan) yang menyebutkan fungsi bank yaitu menyalurkan dan menghimpun dana kepada masyarakat. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan, giro dan deposito yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman yang biasanya disebut kredit. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan kesepakatan antara dua pihak yaitu antara bank dan orang lain yang dimana hal tersebut mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko dapat mempengaruhi kesehatan dan keberlangsungan usaha bank. Akan tetapi, sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar dana bank berasal dari masyarakat, maka hal ini berakibat pemberian kredit perbankan banyak dibatasi oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan Bank Indonesia.

Kredit dapat diperoleh dari mana saja, baik dari bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Namun, bank harus selalu memiliki perhatian khusus terhadap kredit yang disalurkan terhadap calon debitur. Hal ini dikarenakan bank memiliki tanggung jawab atas dana nasabah yang diberikan kepadanya seperti giro, deposito dan tabungan yang selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Keputusan untuk menyalurkan kredit memiliki risiko dan tanggung jawab yang tidak kecil atas ketidakmampuan debitur dalam membayar kewajiban kreditnya pada saat tanggal jatuh tempo. Maka dari itu, demi menjaga dan meminimalisir risiko serta keamanan tersebut, bank harus mampu melakukan penilaian dan pertimbangan yang sangat teliti sebelum mengambil keputusan.

Sebagai lembaga keuangan yang berkegiatan menyalurkan dana (kredit) kepada masyarakat, tidak sedikit masalah yang ada dalam kegiatan tersebut. Seperti ketidaksesuaian kredit yang diperoleh dengan kondisi sesungguhnya nasabah atau perusahaan yang meminjam kredit. Tidak sedikit bank yang mendapatkan masalah ketidaksesuaian kredit seperti ini. Hal ini dapat disebabkan pada analisis kredit yang belum maksimal dalam mengalisa dan menyebabkan pengambilan keputusan pemberian kredit yang kurang sesuai.

Dalam usaha bank meminimalisir masalah dalam penyaluran kredit, dilakukan beberapa hal sebelum pengambilan keputusan penyaluran kredit. Salah satunya adalah analisis laporan keuangan. Dengan menganalisis laporan keuangan calon debitur, maka dapat menilai kondisi keuangan perusahaan (calon debitur), apakah dalam kondisi baik atau tidak. Selain itu, melihat laporan keuangan perusahaan juga dapat mengetahui bahwa calon nasabahnya layak atau tidak mendapatkan kredit. Dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan dapat digunakan dengan menggunakan analisis rasio. Rasio keuangan dapat menggambarkan pertumbuhan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun, lalu dilakukan perbandingan mengenai kondisi keuangan setiap tahunnya yang kemudian berhubungan dengan pengambilan keputusan. Namun, rasio keuangan bukanlah hal mutlak guna pengambilan keutusan akhir. Rasio keuanga

hanya digunakan apabila dapat menunjukkan perubahan arah dan pola keuangan suatu perusahaan.

Selain dengan cara menganalisis laporan keuangan, menilai prinsip 5C calon nasabah juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank. Prinsip 5C tersebut berupa Character, Capital, Collateral, Capacity dan Condition of Economy. Bagi pihak bank, calon nasabah yang memenuhi penilaian prinsip 5C merupakan calon nasabah yang layak mendapatkan kredit. Dimana ketika pihak bank melihat adanya debitur yang memiliki karakter kuat, memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, memiliki jaminan, memiliki modal yang kuat dan kondisi perekonomian yang mana merupakan salah satu keunggulan calon nasabah. Di lain hal, penilaian prinsip 5C ini juga digunakan untuk melihat kredibilitas calon debitur ke depannya.

Pada Bank Mandiri (2018) pula terdapat masalah tentang ketidaksesuaian kredit yang dipengaruhi oleh kurangnya penilaian tentang analisa laporan keuangan. Beberapa hal tersebut yang memperkuat penulis untuk melakukan penelitian ini. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan BPR Mega Karsa Mandiri pada tahun 2018 dikarenakan angka kredit macetnya mencapai angka Rp 2,2 Miliar. BPR Mega Karsa Mandiri dinilai tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga angka kreditnya melonjak cukup drastis. Penetapan status dalam pengawasan khusus tersebut disebabkan karena kelemahan pengelolaan dan manajemen BPR Mega Karsa Mandiri yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat. Bulan Juli 2018 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin BPR Sambas Artha yang disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.

Tabel 1.1
Prestasi BPR BKK Purbalingga

| PERIODE (Tahun) | PRESTASI | TOTAL ASET |
|--------------------|--|--|
| 2012 | Urutan ke-5 terbaik BPR di Indonesia dengan klasifikasi aset. | Rp 100 M – Rp 500 M |
| 2013 | BPR terbaik di Jawa Tengah dengan pertumbuhan aset, pertumbuhan nilai kredit | Aset = Rp 282,9 M Nilai Kredit = Rp 248,264 M |
| 2014 | Peningkatan pembukuan laba | Rp 14 M |
| 2018 | Peningkatan penghimpunan DPK | Rp 351,9 M |

Sumber : www.banyumas.com

Berdasarkan uraian di atas, dijelaskan bahwa untuk mengambil suatu keputusan yang baik dalam penyaluran kredit perlu memperhatikan beberapa aspek. Untuk mendapatkan suatu keputusan yang baik dan guna meminimalisir risiko kedepannya, dilakukan analisa laporan keuangan calon debitur merupakan cara yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan untuk mencegah adanya ketidaksesuaian penyaluran kredit. Selain itu, analisa penilaian prinsip 5C juga dinilai sangat penting guna mengetahui latar belakang dan kemampuan keberlangsungan pengajuan kredit calon debitur. Hal-hal itu jika dilakukan secara maksimal dapat memicu pengawasan kredit menjadi terlaksana secara maksimal. Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh analisis laporan keuangan, penilaian prinsip 5C calon debitur dan pengawasan kredit dengan mengajukan pertanyaan (a) bagaimana analisis laporan keuangan calon debitur dapat dijadikan dasar keputusan pemberian kredit

pada PD. BPR BKK Purbalingga?, (b) bagaimana prosedur penilaian prinsip 5C calon debitur sebelum disetujui permohonan kreditnya pada PD. BPR BKK Purbalingga?, dan (c) bagaimana pelaksanaan dan peranan pengawasan kredit oleh PD. BPR BKK Purbalingga ?

2. Kajian Teori

2.1 Definisi Kredit

Menurut Undang–Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.(Indonesia, 1998). Menurut Iskandar (2013), menjelaskan kredit yaitu piutang bagi bank, maka pelunasannya (*repayment*) yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur terhadap utangnya, sehingga risiko kredit macet dapat dihindari. Menurut Kasmir (2015), kredit dapat berbentuk barang ataupun uang. Dalam kredit baik berbentuk barang maupun uang dalam hal pembayaran atau pelunasannya tetap menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu. Menurut asal mulanya, kredit berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, maka berarti mereka mendapat kepercayaan dari pihak bank.

Meskipun berdasarkan penjelasan di atas demikian, namun yang paling penting daripada dasar diadakannya perjanjian kredit, adalah filosofi dari keharusan adanya suatu perjanjian kredit atas setiap pelepasan kredit bank terhadap nasabahnya. Filosofi tersebut merupakan berfungsinya perjanjian kredit sebagai alat bukti dan sebagaimana diketahui bahwa surat-surat perjanjian yang ditandatangani adalah suatu akta. Dalam meyakinkan bank bahwa penyaluran kredit tersebut termasuk aman, maka diadakan dahulu proses analisis kredit. Analisis kredit yang dimaksud ini yaitu menganalisa mengenai latar belakang perusahaan dan pemiliknya, prospek perusahaan untuk kedepannya, jaminan yang digunakan, modal yang digunakan, kondisi perekonomian perusahaan dan pemiliknya, dll. Analisis kredit ini harus dilakukan oleh bank karena guna mencegah adanya risiko-risiko yang timbul dari adanya ketidaksesuaian pemberian kredit.

Pemberian kredit tanpa adanya analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah akan dengan mudahnya memberikan data-data yang fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya belum tentu layak untuk diberikan. Pada akibatnya, apabila terjadi kesalahan dalam analisis kredit maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih atau macet. Akan tetapi, kesalahan analisis kredit bukan menjadi faktor utama penyebab kredit macet, walaupun sebagian besar kredit macet diakibatkan dari salahnya dalam analisis kredit. Apabila kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, langkah yang dilakukan oleh bank adalah berupaya untuk menyelamatkan kredit tersebut dengan berbagai cara tergantung dengan kondisi penyebab kemacetan kredit tersebut. Jika memang masih bisa untuk dibantu atau diselamatkan, maka bank akan melakukan tindakan membantu nasabah dengan apakah menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang masa jangka waktunya. Namun, apabila sudah tidak bisa diselamatkan maka tindakan terakhir bagi bank adalah dengan menyita jaminan yang telah dijaminakan oleh nasabah.

2.2 Analisis Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil refleksi dari transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Transaksi – transaksi yang dilakukan itu dicatat, digolongkan dan diringkas dalam bentuk satuan uang, kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan. Laporan keuangan

merupakan sebuah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan pada sebuah entitas. Tujuan utama sebuah laporan keuangan pada dasarnya untuk kepentingan umum yaitu menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari sebuah entitas yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Kasmir (2015) menjelaskan bahwa kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya akan terlihat setelah laporan keuangan disusun secara rinci berdasarkan data yang relevan serta dilakukan melalui prosedur akuntansi dan penilaian yang benar. Kondisi keuangan perusahaan yang dimaksud adalah diketahuinya jumlah harta, kewajiban serta modal dalam neraca yang dimiliki.

Di Indonesia cara penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dimana penyajiannya diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.1 paragraf 11 (revisi 2013:1.2) yaitu terdiri dari :

1) Neraca

Neraca pada umumnya berguna untuk menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan. Neraca dapat digunakan untuk menggambarkan potret kondisi keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu (snapshot keuangan perusahaan), dimana meliputi aset, kewajiban atau hutang, dan hak para pemilik. Pada dasarnya, neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat menjelaskan gambaran posisi keuangan perusahaan. Dalam arti lain, neraca dapat menampilkan suatu keseimbangan antara keputusan investasi dengan keputusan pendanaan.

2) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan operasi dimana menggambarkan pendapatan yang dihasilkan, biaya – biaya yang harus dibayarkan, dan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.

3) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak terhadap kas.

Secara umum, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi bagi perusahaan baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Analisis laporan keuangan dilakukan dengan mengukur hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur tersebut dari tahun ke tahun atau dari tiap periode. Pada dasarnya, analisis laporan keuangan dilakukan untuk melihat prospek dan risiko yang akan dihadapi perusahaan. Prospek dapat dilihat dari tingkat keuntungan (profitabilitas) perusahaan, sedangkan risiko dapat dilihat dari kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan. Analisis laporan keuangan penting dilakukan untuk menilai mengenai keamanan penyaluran kredit. Kreditur perlu mengetahui kondisi keuangan jangka pendek (likuiditas), stabilitas, dan profitabilitas perusahaan sebelum pengambilan keputusan pemberian kredit.

Analisis posisi keuangan jangka pendek merupakan hal penting, baik bagi pihak manajemen maupun pihak diluar perusahaan seperti kreditur dan pemilik perusahaan. Bagi bank komersial atau kreditur jangka pendek lainnya sangat memperhatikan tingkat keamanan bagi kredit-kredit jangka pendeknya, manajemen berkepentingan untuk mengetahui penggunaan modal kerja, dan pemegang saham beserta kreditur jangka panjang berkepentingan untuk mengetahui dan memperhatikan prospek pembayaran dividen maupun bunga. Analisis laporan keuangan diperlukan oleh kreditur jangka panjang guna mengetahui jaminan investasinya, prospek di masa depan, dan bagaimana perkembangan perusahaan selanjutnya.

2.3 Penilaian Prinsip 5C

Menurut Kasmir (2015), jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah sebuah tambahan, terutama hanya untuk melindungi kredit macet akibat suatu musibah. Akan tetapi, apabila suatu kredit yang diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam sehingga nasabah tersebut layak mendapatkan kredit, fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu, dalam pemberian kredit bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit dengan benar. Pada dasarnya, sebelum bank menyalurkan kredit, maka bank harus merasakan yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut dapat diperoleh dari penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang naabahnya. Ada beberapa prinsip yang sering dilakukan oleh bank, salah satunya yaitu dengan melakukan analisis 5C.

Sistematika kredit dalam pelaksanaannya mencakup beberapa informasi pokok untuk menunjang pengambilan keputusan. Menurut Ismail (2011), masing-masing komponen pokok yang menjadi pedoman analisis kredit adalah sebagai berikut :

1. Character

Karakter atau watak dari calon debitur merupakan hal yang penting untuk dianalisis karena hal tersebut menyangkut dengan tanggung jawab moral calon debitur dalam upaya untuk membayar kembali atau melunasi pinjamannya. Selain itu, aspek psikologi moral, itikad baik calon debitur, dan komitmennya untuk pengakuan hutang berikut dengan pelunasannya merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pihak kreditur sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Bank ingin mengetahui seberapa besarnya komitmen yang dimiliki oleh calon debiturnya untuk melakukan pelunasan atas kredit yang diajukannya. Cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon debitur adalah salah satunya dengan melakukan penelitian atau analisis yang mendalam tentang calon debitur.

2. Capacity

Capacity atau kapasitas berhubungan langsung dengan analisis sebelumnya yaitu watak calon debitur yang berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam melunasi pinjamannya. Kemauan dan kemampuan merupakan dua hal yang saling berhubungan. Jika nasabah hanya mempunyai kemampuan membayar, hal itu akan percuma. Sebaliknya, jika nasabah hanya mempunyai kemauan tanpa adanya kemampuan untuk membayar pinjamannya maka nasabah tidak akan bisa melunasi pinjamannya. Bank perlu mengetahui dengan pasti apakah calon debiturnya memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajibannya setelah adanya keputusan penyaluran kredit. Kemampuan calon debitur ini sangat penting dikarenakan hal ini menjadi sumber utama pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh bank.

3. Capital

Capital atau modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Untuk melihat apakah modal yang digunakan efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal itu didapatkan. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon debitur dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit.

4. Collateral

Collateral merupakan suatu kekayaan yang digunakan sebagai jaminan guna kepastian pelunasan dikemudian hari, kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya. Disamping harus melebihi jumlah kredit yang disalurkan, jaminan juga harus diteliti dahulu keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah seperti kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan secepat mungkin. Tidak hanya jaminan yang berwujud yang dapat digunakan, tetapi juga dapat berbentuk jaminan yang tidak berwujud, seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *Letter of guarantee*, *Letter of comfort*, rekomendasi dan avails.

5. Condition of Economy

Condition of economy merupakan faktor ekstern yang secara tidak langsung mempengaruhi usaha calon debitur, terutama pada kondisi persaingan bisnis yang semakin ketat. Akan tetapi disamping itu juga aspek-aspek dibidang lain seperti ekonomi, politik, dan kondisi mata uang lokal terhadap mata uang lainnya. Aspek-aspek tersebut dapat mempengaruhi perekonomian pada waktu dan jangka waktu tertentu, dimana kredit yang diberikan bank kepada pemohon harus melihat prospek usaha dari sektor yang dijalankan haruslah memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

2.4 Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit sangat perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyimpangan atau kredit bermasalah dikemudian hari. Hal ini dikarenakan pengawasan merupakan penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan yang disalurkan atau diinvestasikan dibidang perkreditan. Pengawasan kredit akan menjadi lebih penting apabila diperhatikan bahwa kredit merupakan *risk asset* bagi bank karena asset tersebut dikuasai oleh pihak luar bank yaitu nasabah. Menurut Muhammad (2012), pengawasan kredit merupakan suatu fungsi manajemen dan usahanya untuk penjagaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk kredit yang lebih baik dan efisien guna menghindari terjadinya penyimpangan dengan cara mendorong terciptanya kepatuhan akan kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan dengan benar.

Pengawasan yang dilakukan dapat mencakup upaya untuk memeriksa, apakah seluruh yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Selain itu, pengawasan dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan dalam proses kredit yang sedang berjalan. Pengawasan kredit dilaksanakan tidak akan terlepas dari tujuan yang akan bank capai. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menjaga dan mengawasi pengelolaan kekayaan bank serta menghindari penyelewengan yang terjadi.
2. Guna memastikan ketelitian dan kebenaran administrasi bidang perkreditan yang lebih baik.
3. Guna memajukan efisiensi dalam pengelolaan dan pelaksanaan usaha dibidang perkreditan serta mendorong tercapinya rencana yang ada.
4. Guna menjaga kebijaksanaan yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.

Masing-masing tujuan yang telah dijelaskan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Selain adanya tujuan, pengawasan kredit yang dilakukan pun tidak lepas dari ruang lingkup yang ditetapkan. Ruang lingkup tersebut dapat dibedakan menjadi :

1. Pengawasan dalam arti sempit yaitu pengawasan administrasi ruang lingkup guna mengetahui kebenaran data-data administrasi.
2. Pengawasan dalam arti luas yaitu kegiatan pengendalian dalam suatu perusahaan yang dibuat oleh manajemen kontrol yang memiliki ruang lingkup lebih luas meliputi *financial audit*, *operational audit* atau *management policy*.

3. Metode Penelitian

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbal*, teknik pengumpulan datanya triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Filsafat postpositivime sering disebut sebagai paradigma interpretif dan konstrutif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (*reciprocal*). Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah merupakan obyek yang berkembang apa adanya, tidak ada manipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek yang diteliti.

Metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif analitik yang dipakai dalam penelitian ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono (2016), adalah metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian karena permasalahan studi deskriptif yang meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan dan interaksi yang terjadi. Pendekatan studi kasus dilakukan untuk menarik kesimpulan terhadap kejadian atau fenomena yang diteliti. Studi kasus akan memahami, menelaah, dan kemudian menafsirkan makna yang didapat dari fenomena yang diteliti tersebut.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan datanya, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2016). Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dengan beberapa pejabat yang berwenang dan data sekunder berupa laporan keuangan debitur pada bulan Januari-Februari 2019 di BPR BKK Purbalingga dan laporan keuangan PD. BPR BKK Purbalingga.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data sekunder, dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan datanya antara lain sebagai berikut :

3.2.1 Wawancara

Wawancara yaitu dengan cara mengadakan wawancara secara mendalam kepada pihak-pihak terkait yaitu pejabat yang berwenang dalam PD. BPR BKK Purbalingga untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3.2.3 Dokumentasi

Menurut Suharsaputra (2014) dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang tertulis maupun dicetak dimana dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. Dokumen itu sendiri merupakan fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumentasi dianggap sebagai pelengkap dari sebuah penelitian. Hasil penelitian dari observasi akan lebih lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh sejarah atau dokumen-dokumen perusahaan yang ada.

3.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan sebuah proses pencatatan dan penyusunan secara sistematis data yang telah diperoleh melalui catatan hasil wawancara, dokumentasi yang dihubungkan dengan studi kepustakaan yang ada dengan menjelaskan lebih dalam penelitian yang dilakukan dan membuat hasil kesimpulan yang dapat dipelajari oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Saifuddin (2010) analisis deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode analisis deskriptif agar diarahkan dapat menjawab rumusan masalah yang ada terkait analisis laporan keuangan, penilaian prinsip 5C dan pengawasan kredit.

3.3.1 Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan calon debitur dapat dilihat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor XX/POJK.03/2018, dimana :

Analisis kredit harus dibuat secara akurat, lengkap dan obyektif, paling sedikit memuat hal-hal berikut :

- 1) Informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
- 2) Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan melihat kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktik *mark-up* yang dapat merugikan BPR
- 3) Penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit

3.3.2 Penilaian Prinsip 5C

Analisis penilaian prinsip 5C dapat dilihat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor XX/POJK.03/2018, tentang :

Analisis kredit paling sedikit mencakup penilaian atas karakter (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha debitur (*condition of economy*) atau yang sering dikenal dengan 5C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit dimana dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan atau sumber penghasilan terkait dengan obyek yang dibiayai oleh pemohon kredit serta menyajikan aspek hukum perkreditan yang bertujuan untuk melindungi BPR dari kemungkinan-kemungkinan risiko yang timbul.

3.3.1 Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit yang dilakukan, akan dianalisis dengan melihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor XX/POJK.03/2018, yang meliputi :

1. Prinsip-prinsip Pengawasan Kredit
 - Fungsi pengawasan kredit yang tercermin dalam sistem pengendalian intern BPR terkait dengan perkreditan yang terdiri dari organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan dan prosedur serta sistem informasi di bidang perkreditan.
 - Adanya mekanisme bahwa pelanggaran terhadap PKPB dan prosedur pelaksanaan kredit dapat segera diketahui dan dilaporkan pada pejabat yang berwenang.
 - Adanya kesempatan bagi pihak yang diawasi untuk memberikan penjelasan tentang latar belakang permasalahan dan masukan sebagai solusi ke depan.
 - Pengawasan kredit yang meliputi pengawasan sehari-hari oleh direksi atau pejabat yang berwenang dalam menangani perkreditan dan pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja audit intern atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern terhadap semua aspek perkreditan.
2. Objek Pengawasan Kredit
 - Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur pemberian kredit serta pejabat atau pegawai BPR yang berkaitan dengan perkreditan.
 - Pengawasan terhadap semua jenis kredit dan debitur. Pengawasan terhadap pihak-pihak tersebut harus dilakukan secara intensif.
3. Cakupan Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit yang paling sedikit meliputi cakupan terhadap :

 - Terhadap intern BPR
 - Terhadap ekstern BPR
4. Audit Intern Perkreditan

Fungsi audit intern adalah memantau kinerja sistem pengendalian intern serta memastikan bahwa pelaksanaan perkreditan telah dilakukan dengan benar sesuai dengan PKPB dan telah memenuhi cakupan prinsip pengawasan kredit yang disertai dengan tindakan atau saran perbaikan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Pengajuan Kredit Calon Debitur dan Pengawasan Kredit BPR BKK Purbalingga

1. Analisis laporan keuangan calon debitur PD. BPR BKK Purbalingga

Secara umum, BPR BKK ini sebagian besar debiturnya merupakan debitur usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) yang pada faktanya mereka tidak memiliki laporan keuangan yang dibuat secara formal sebagaimana tertera dalam peraturan standar akuntansi keuangan (SAK). Akan tetapi, setiap calon debitur tetap mempunyai catatan-catatan terkait keuangan yang dapat menggantikan laporan keuangan dalam persyaratannya.

Pada BPR tetap melakukan analisis laporan keuangan calon debiturnya walaupun melalui catatan-catatan keuangan usaha mereka yang pada nantinya akan tetap menunjukkan kondisi keuangan. Selain dengan catatan tersebut, analisis laporan keuangan pun diperkuat dengan survey lapangan yang dilakukan oleh analis kredit.

Melalui data laporan keuangan yang disertakan kepada petugas kredit BPR, selanjutnya dilakukan analisis oleh analis kredit antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan Neraca Perusahaan

Penyusunan neraca dilakukan guna mengetahui total aktiva dan total passiva yang dimiliki oleh calon debitur.

2. Perhitungan Plafond Kredit

Perhitungan plafond kredit yang diajukan calon debitur digunakan agar pihak BPR mengetahui apakah jumlah plafond kredit yang diajukan sebanding dengan total aktiva dan passiva yang dimiliki calon debitur, sehingga tidak terjadi *mark up* ataupun ketidaksesuaian kredit.

3. Perhitungan Laba Rugi

Perhitungan laba rugi akan dibutuhkan pihak BPR guna mengetahui besarnya laba yang calon debitur peroleh setiap bulannya yang nantinya akan berpengaruh pada besarnya angsuran calon debitur.

2. Analisis penilaian prinsip 5C calon debitur PD. BPR BKK Purbalingga

Setelah analisis laporan keuangan dilakukan oleh analis kredit, selanjutnya analis kredit melakukan cakupan/evaluasi permohonan kredit calon debitur. Evaluasi nasabah dalam hal ini berkaitan dengan analisis prinsip 5C calon debitur. Analisis penilaian prinsip 5C dilakukan untuk memudahkan pihak BPR BKK dalam mengetahui calon debitur dalam berbagai aspek. Proses analisis prinsip 5C pada BPR BKK dilakukan analis kredit berdasarkan kondisi lapangan yang sudah diketahui oleh petugas kredit yang kemudian menunjukkan rangkuman penilaian calon debitur.

a. *Character*

Dapat dilihat dari informasi yang dikumpulkan melalui lingkungan sekitarnya maupun dari bank lain yang dimana seharusnya calon debitur memiliki watak yang baik dan tidak pernah mengalami kredit macet.

b. *Collateral*

Calon debitur yang akan mengajukan kredit harus mempunyai jaminan yang akan diajukan dimana jaminan tersebut merupakan milik pribadi dengan ketentuan dan taksiran harga yang ditentukan oleh bank.

c. *Capacity*

Melihat dan meninali calon debitur dalam bagaimana kemampuannya membayar kredit. Dimana penghasilan bersihnya harus lebih besar dari angsuran kreditnya.

d. *Capital*

Penilaian terhadap usaha yang dimiliki merupakan benar-benar milik pribadi atau bukan.

e. *Condition of Economy*

Penilaian ini melihat dimana kondisi ekonomi calon debitur dalam kondisi baik atau tidak terlilit hutang lain.

3. Pengawasan kredit debitur PD. BPR BKK Purbalingga

Jika pada keputusan akad kredit nasabah diterima, maka yang selanjutnya dilakukan oleh BPR BKK adalah melakukan pengawasan terhadap kredit yang disalurkan. Pengawasan kredit yang dilakukan tidak hanya tertuju pada nasabah, akan tetapi pada intern pejabat/karyawan yang berwenang juga dilakukan pengawasan. Dalam BPR BKK ada beberapa cara yang dilakukan guna melakukan pengawasan baik mengawasi nasabah maupun karyawannya. Selain dilakukan pada nasabah dan karyawan, proses pengawasan pun tidak hanya dilakukan secara aktif atau secara langsung. Pada nasabah yang ada, pengawasan secara

pasif pun dilakukan oleh pihak BPR BKK guna mendapatkan hasil pengawasan yang mekasimal atau meminimalisir risiko-risiko yang akan terjadi.

Pengawasan kredit yang dilakukan secara periodik dan meminta pertanggung jawaban *Account Officernya* merupakan bentuk pengawasan terhadap nasabah dan karyawannya. Pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik apabila dalam prosesnya tidak sebagaimana mestinya. Untuk memaksimalkan pengawasan kredit maka pihak BPR melakukan fungsi audit internalnya

4.2 Pembahasan

BPR merupakan lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dimana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. BPR BKK berfungsi sebagai salah satu lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas untuk menjalankan usaha sebagai Lembaga Kredit Mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Seperti pada Bank Umum, BPR BKK juga melakukan pembiayaan pada masyarakat. Pembiayaan yang dilakukan BPR BKK yaitu menyalurkan kredit pada masyarakat.

Pihak BPR BKK melakukan survei terhadap kondisi calon debiturnya dan barang jaminannya yang kemudian data hasil survei tersebut dikelola atau dianalisis oleh analis kredit yang berwenang. Analisis itu dilakukan guna mengetahui riwayat calon debiturnya apakah baik atau buruk dalam status keuangannya dan juga guna mengetahui apakah permohonan kredit yang diajukan sesuai dengan kemampuan calon debiturnya. Analisis yang dilakukan oleh analis kredit meliputi analisis laporan keuangan calon debitur sehingga dapat diketahui apakah laporan keuangan yang disertakan sesuai dengan kondisi lapangannya atau tidak. Analisis laporan keuangan juga digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan calon debitur sedang dalam kondisi baik atau tidak seperti tetera dalam neraca dan laporan laba-ruginya.

Setelah melakukan analisis laporan keuangannya, selanjutnya analis kredit melakukan analisis penilaian prinsip 5C yang meliputi *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*nya apakah dalam keadaan standar, baik atau buruk. Jika pada aspek *character* menunjukkan tidak layak maka perlu dikaji ulang bahwa keadaan calon debitur memiliki karakter yang tidak baik dan sudah mendapatkan nilai jelek pada BI *checking* yang nantinya akan berpengaruh pada pembayaran angsurannya. Selanjutnya analisis *capacity* yaitu untuk mengetahui keadaan fisik, pengalaman usaha, kondisi usaha dan keuntungan calon debitur yang dilihat berdasarkan analisis laporan keuangannya. Analisis selanjutnya mengenai *capital* yaitu untuk mengetahui modal yang digunakan untuk modal usaha seberapa besar yang akan mempengaruhi jumlah laba yang dihasilkan. Kemudian analisis mengenai *collateral* digunakan untuk mengetahui nilai jaminan yang diserahkan cukup untuk mendukung pinjaman yang diajukan atau tidak. Yang terakhir yaitu analisis mengenai *condition of economy* dimana dilakukan untuk mengetahui apakah usaha yang dilakukan ada pengaruh negatif atau tidak terhadap lingkungan sosial calon debitur.

Pengawasan pada BPR BKK ini dilakukan pada nasabah dan karyawannya. Selain itu, proses pengawasan pada BPR BKK ini dilakukan secara aktif atau dilakukan secara periodik dan dilakukan secara pasif atau pantauan pasif dari kantor pada saat pembayaran angsuran. Kemudian selain itu dilakukan pula audit internal bank yang dilakukan oleh SKAI untuk memeriksa secara langsung apakah kinerja seluruh cabang sudah sesuai prosedur atau SOP yang ada atau tidak. Selain itu, audit internal bank juga dilakukan untuk meminimalisir adanya kredit bermasalah atau ketidaksesuaian kredit pada BPR BKK.

Menurut peneliti analisis laporan keuangan, penilaian prinsip 5C calon debitur dan pengawasan kredit sangat memberikan banyak manfaat untuk PD. BPR BKK Purbalingga, karena dengan adanya proses analisis laporan keuangan dan penilaian prinsip 5C akan memudahkan pihak BPR BKK dalam pengambilan keputusan pemberian kredit. Sehingga setelah adanya keputusan pemberian kredit disetujui akan memberikan kemudahan pihak BPR BKK dalam melakukan pengawasan kredit karena sudah mengetahui kondisi dan gambaran nasabahnya.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai “Analisis Laporan keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur, dan Pengawasan Kredit terhadap Efektivitas Pemberian Kredit pada PD. BPR BKK Purbalingga” maka penulis dapat mengambil kesimpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan diawal Skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Analisis laporan keuangan calon debitur pengajuan kredit sudah terlaksana oleh PD. BPR BKK Purbalingga , akan tetapi pada pelaksanaannya kriteria yang ditetapkan belum memenuhi standar laporan keuangan yang pada semestinya. Pada BPR BKK ini masih melihat laporan keuangan sederhana yang dibuat oleh calon debiturnya.
2. Penilaian prinsip 5C calon debitur sudah terlaksana dimana pada PD. BPR BKK Purbalingga mempunyai standar minimal yang harus dipenuhi oleh calon debiturnya yaitu minimal ada 3 C yang harus terpenuhi yaitu *Character, Capital dan Collateral*. Akan tetapi, pada pelaksanaannya semua nasabah memenuhi 5C yang ada, karena kelima prinsip tersebut saling berkaitan. Maka dari itu ketika 3C sudah terpenuhi, kelima prinsip yang ada akan terlihat jadi nasabah BPR BKK tetap akan memenuhi penilaian prinsip 5Cnya.
3. Ada 3 cara pengawasan kredit yang dilakukan oleh PD. BPR BKK Purbalingga yaitu pertama pengawasan secara periodik yang dilakukan oleh pejabat kredit langsung kepada nasabahnya setiap bulannya. Kemudian, pengawasan secara pasif yang dilakukan oleh bank dengan mengawasi nasabah dalam hal pembayaran angsuran. Selanjutnya yang ketiga dilakukan pengawasan dengan sistem online, yaitu penggunaan fasilitas sms yang dilakukan oleh bank setiap bulannya untuk menghubungi nasabah saat mendekati tanggal jatuh tempo.
4. Pelaksanaan analisis laporan keuangan, penilaian prinsip 5C calon debitur, dan pengawasan kredit yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor XX/POJK.03/2018.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran kepada BPR BKK Purbalingga dan untuk peneliti selanjutnya :

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian analisis pembiayaan kredit yang tegas dalam melakukan wawancara sehingga dapat mendapatkan informasi yang jelas.
2. Untuk PD. BPR BKK Purbalingga diharapkan lebih baik lagi dalam perolehan catatan keuangan calon debitur sehingga akan memudahkan pihak BPR BKK dalam menganalisis laporan keuangan dapat dilakukan secara maksimal tidak terkesan apa adanya. Diharapkan adanya standar yang jelas dalam proses persyaratan laporan keuangan calon debitur agar laporan keuangan yang diserahkan calon debitur sama antara satu debitur dengan yang lain.

Referensi

- Cahyaningtyas, M. D., Hidayati, K., & Retnowati, N. (2015). Kebijakan Pemberian Kredit Kepada Calon Nasabah Oleh Pt . Bank Tabungan Negara. *Jurnal Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya*, 106–118.
- Hermansyah. (2017). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (IAI) 2017. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Iskandar, S. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : In Media.
- Ismail. (2011). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir, D. (2015a). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir, D. (2015b). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sageri Alaila, Y. (2012). Pengaruh laporan keuangan perusahaan terhadap keputusan pemberian kredit modal kerja. *Jurnal Equilibrium*, 2, 95–103.
- Saifuddin, A. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sanjaya, A. R., & Marlius, D. (2017). Peranan Laporan Keuangan Dalam Kebijakan Pemberian Kredit Kepada Calon Nasabah Pada Pt. Bpr Batang Kapas. *Jurnal Akuntansi Keuangan*, 12.
- Saraswati, R. A., & Yogyakarta, U. N. (2012). Peranan analisis laporan keuangan, penilaian prinsip 5C calon debitur dan pengawasan kredit terhadap kreatifitas pemberian kredit. *Jurnal Nominal*, 1(1), 1–13.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Suharsaputra, U. (2014). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahyuni, N. (2017). Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit sebagai Perlindungan Bank. *Jurnal Akuntansi*.
- Wicaksono, A. B., Salean, D., Universitas, F. E., Universitas, F. E., & Aryabagus, S. (2018). Peranan Analisa Laporan Keuangan Dalam Mempertimbangkan Permohonan Kredit Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Pahlawan. *Jurnal Ekonomi*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Undang-Undang Perbankan. In *Undang-Undang Nomor 10*. Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Perbankan. In *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 11*. Sekretariat Negara.
- website:
<http://bprbkkpurbalingga.blogspot.com/2015/06/latar-belakang-bpr-bkk-purbalingga.html>
diakses pada 20 Desember 2018
<https://bprjateng.co.id/bpr/> diakses pada 26 Mei 2019
<https://www.purbalinggakab.go.id/v1/bpr-bkk-purbalingga-terbaik-nomor-lima-di-indonesia/>
diakses pada 25 Juni 2019
<https://ekbis.sindonews.com/read/1312037/178/kredit-macet-capai-rp22-miliar-ojk-bekukan-bpr-di-depok-1528270473> diakses pada 27 Juli 2019